

## STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL: PENGUATAN KEDAULATAN MELALUI HILIRISASI, KETAHANAN PANGAN, DAN REFORMASI FISKAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Fenni Yufantria

Politeknik Negeri Lampung  
[fennyufantriaa@gmail.com](mailto:fennyufantriaa@gmail.com)

Al-Amin

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia  
[al.amin-2024@feb.unair.ac.id](mailto:al.amin-2024@feb.unair.ac.id)

### Abstract

*This study examines Indonesia's national economic transformation strategy, which focuses on three main pillars, namely downstreaming, food security, and fiscal reform, as efforts to strengthen economic sovereignty towards the vision of Indonesia Emas 2045. Downstreaming plays a role in increasing the added value of natural resources, reducing dependence on raw material exports, and encouraging the creation of globally competitive domestic industries. Food security is the foundation of social and economic stability, ensuring the availability and affordability of food for all citizens on a sustainable basis. Fiscal reform acts as a pillar that guarantees the availability of development financing, provides strategic incentives, and improves state budget management. This study uses a literature review method by analysing relevant academic sources, policy documents, and case studies. The findings indicate that the synergy among these three pillars can significantly strengthen economic sovereignty, enhance national competitiveness, and accelerate the achievement of inclusive and sustainable development. However, various challenges such as infrastructure gaps, climate change, global economic volatility, and suboptimal governance must be addressed through adaptive, collaborative, and evidence-based policies.*

**Keywords:** Downstreaming, Food Security, Fiscal Reform, Economic Sovereignty, Indonesia Emas 2045, National Economic Transformation.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi transformasi ekonomi nasional Indonesia yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu hilirisasi, ketahanan pangan, dan reformasi fiskal, sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi menuju visi *Indonesia Emas 2045*. Hilirisasi berperan dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta mendorong terciptanya industri domestik yang berdaya saing global. Ketahanan pangan menjadi fondasi stabilitas sosial dan ekonomi, memastikan ketersediaan serta keterjangkauan pangan secara berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Reformasi fiskal bertindak sebagai penopang yang menjamin tersedianya pembiayaan pembangunan, memberikan insentif strategis, dan memperbaiki tata kelola anggaran negara. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis sumber-sumber akademik, dokumen kebijakan, dan studi kasus yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi ketiga pilar ini dapat

secara signifikan memperkuat kedaulatan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, dan mengakselerasi pencapaian pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Namun, berbagai tantangan seperti kesenjangan infrastruktur, perubahan iklim, volatilitas ekonomi global, dan tata kelola yang belum optimal perlu diatasi melalui kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti.

**Kata kunci:** Hilirisasi, Ketahanan Pangan, Reformasi Fiskal, Kedaulatan Ekonomi, Indonesia Emas 2045, Transformasi Ekonomi Nasional.

## Pendahuluan

Indonesia saat ini berada pada persimpangan strategis dalam sejarah ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil selama beberapa dekade terakhir belum sepenuhnya mampu mengangkat seluruh lapisan masyarakat keluar dari kemiskinan, memperkecil ketimpangan pendapatan, dan memperkuat daya saing nasional di pasar global. Visi Indonesia Emas 2045, yang bertepatan dengan satu abad kemerdekaan, menjadi simbol sekaligus target kolektif untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Namun, pencapaian visi tersebut memerlukan transformasi ekonomi yang mendasar, tidak hanya pada sektor produksi dan perdagangan, tetapi juga pada struktur industrialisasi, kebijakan pangan, dan tata kelola fiskal negara (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2023).

Transformasi ekonomi adalah proses mengubah struktur perekonomian dari berbasis komoditas mentah menjadi berbasis industri bernilai tambah tinggi, berteknologi, dan berdaya saing global. Saat ini, ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah seperti mineral, kelapa sawit, dan batubara membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga dunia (Basri, 2023). Dengan hilirisasi, komoditas tersebut dapat diolah di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah lebih besar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan devisa negara. Urgensi ini semakin terasa di tengah dinamika perdagangan global yang mengarah pada proteksionisme dan kompetisi ketat antar-negara (Tsirwiyati, 2024).

Hilirisasi industri bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga salah satu wujud kedaulatan negara atas sumber daya alamnya. Dengan mengolah sumber daya di dalam negeri, negara dapat mengendalikan rantai nilai produksi, menjaga kontrol harga, dan memastikan distribusi manfaat yang lebih merata bagi masyarakat. Contohnya, hilirisasi nikel untuk industri baterai kendaraan listrik tidak hanya membuka pasar baru tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global energi masa depan. Keberhasilan hilirisasi akan memerlukan dukungan kebijakan fiskal, infrastruktur industri, serta inovasi teknologi (Yuliana, 2021).

Selain industrialisasi, ketahanan pangan menjadi komponen vital dalam kedaulatan ekonomi. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam untuk memproduksi pangan secara mandiri, tetapi tantangan seperti degradasi lahan, perubahan iklim, dan ketergantungan pada impor masih menjadi hambatan serius. Kemandirian pangan bukan hanya erkat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat,

melainkan juga dengan stabilitas politik dan keamanan nasional, karena krisis pangan berpotensi memicu gejolak sosial. Upaya ketahanan pangan yang berkelanjutan memerlukan modernisasi pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan sistem distribusi yang efisien (Nangaa & Widjaja, 2024).

Reformasi fiskal adalah komponen strategis untuk mendukung industrialisasi dan ketahanan pangan. Sistem perpajakan yang sehat, efisien, dan adil dapat menghimpun pendapatan negara yang cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur, riset, dan transfer teknologi. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang tepat sasaran dapat memberi insentif pada sektor-sektor prioritas seperti pengolahan mineral, pertanian modern, dan energi terbarukan. Reformasi fiskal juga mencakup optimalisasi belanja negara agar lebih produktif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mempercepat tercapainya tujuan Indonesia Emas 2045 (Cahyono & Kusumaningtyas, 2024).

Transformasi ekonomi tidak akan berjalan tanpa hambatan. Tantangan internal meliputi rendahnya kualitas SDM, infrastruktur industri yang belum merata, birokrasi yang lambat, serta praktik korupsi yang menggerogoti efisiensi kebijakan. Tantangan eksternal datang dari persaingan global, ketidakpastian geopolitik, hingga volatilitas pasar komoditas. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat memaksa negara untuk beradaptasi cepat, atau risiko tertinggal akan semakin besar (Thorbecke, 2023). Oleh karena itu, strategi transformasi ekonomi memerlukan kebijakan adaptif dan lintas-sektor yang terintegrasi.

Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Transisi global menuju energi ramah lingkungan dan kendaraan listrik mendorong permintaan terhadap nikel, kobalt, dan bahan baku lainnya yang dimiliki Indonesia. Perubahan pola konsumsi dunia juga menuntut produk pangan yang lebih sehat, organik, dan berkelanjutan — sebuah pasar yang dapat dimasuki melalui inovasi pertanian lokal. Dengan memanfaatkan tren ini secara cerdas, hilirisasi industri dan ketahanan pangan dapat menjadi kekuatan utama dalam strategi pembangunan jangka Panjang (Su, 2021).

Kajian ini hadir di tengah meningkatnya diskusi akademik tentang pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Banyak penelitian terdahulu telah membahas hilirisasi atau ketahanan pangan secara terpisah, namun jarang yang mengintegrasikan keduanya bersama aspek reformasi fiskal dalam satu kerangka kedaulatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif, mengkaji hubungan antarvariabel tersebut untuk merumuskan strategi yang lebih komprehensif dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (literature review), yaitu analisis kritis terhadap sumber-sumber akademik, dokumen kebijakan, laporan resmi, dan studi kasus yang relevan. Pendekatan ini bertujuan memberikan

gambaran komprehensif, berbasis bukti, dan relevan terhadap kebutuhan strategis Indonesia menuju 2045 (Eliyah & Aslan, 2025).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penguatan Kedaulatan melalui Hilirisasi dan Ketahanan Pangan**

Jalur Indonesia menuju kedaulatan ekonomi nasional semakin terpusat pada dua pilar penting: hilirisasi sumber daya alam dan penguatan ketahanan pangan. Hilirisasi, yaitu proses mengolah komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri, bukan sekadar strategi ekonomi—tetapi juga sarana untuk merebut kembali kendali atas kekayaan alam bangsa (Breuer, 2018). Perubahan ini mengurangi ketergantungan historis Indonesia pada ekspor bahan mentah yang sering membuat negara terjebak pada fluktuasi harga global dan manfaat ekonomi yang terbatas. Dengan memperluas industri pengolahan di dalam negeri, Indonesia bertujuan membangun perekonomian yang tangguh, mampu menghadapi guncangan eksternal, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hiola et al., 2024).

Pemerintah nasional telah mengakui hilirisasi sebagai kunci kedaulatan ekonomi, dengan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan produksi bernilai tambah di berbagai sektor seperti nikel, bauksit, kelapa sawit, dan komoditas pertanian. Sebagai contoh, hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik memanfaatkan posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, menempatkan negara pada posisi strategis dalam transisi energi bersih global (Presiden Republik Indonesia, 2023). Langkah ini tidak hanya mendiversifikasi produk ekspor, tetapi juga mendorong lapangan kerja serta memacu inovasi teknologi. Target ambisius pemerintah sejauh ini telah menarik aliran investasi dan pertumbuhan lapangan kerja, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya bergantung pada industri ekstraktif menjadi pusat aktivitas industri (Rijoly, 2025).

Sejalan dengan hilirisasi industri, ketahanan pangan tetap menjadi fondasi utama kedaulatan dan stabilitas Indonesia. Menjamin ketersediaan pangan yang andal dan cukup berdampak langsung pada ketahanan nasional, kohesi sosial, dan kemandirian politik. Pemerintah tengah dengan aktif mengatasi tantangan seperti berkurangnya lahan pertanian produktif, perubahan iklim, serta ketimpangan ketersediaan pangan antarwilayah (Ministry of Finance Indonesia, 2021). Inisiatif strategis meliputi modernisasi sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan irigasi, peningkatan kapasitas petani, dan penerapan sistem pertanian terpadu yang meminimalkan limbah serta meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan cadangan pangan nasional dan stabilisasi harga pangan juga menjadi inti upaya untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang terjangkau dan bergizi (Rozi, 2025).

Konsep kedaulatan pangan—yang menekankan hak bangsa dan komunitas untuk menentukan kebijakan pangan sendiri—sangat erat kaitannya dengan keamanan nasional. Kepemimpinan nasional akhir-akhir ini menegaskan bahwa tidak akan ada

kedaulatan sejati tanpa kemampuan memproduksi dan mengendalikan pasokan pangan domestik. Sikap ini mencerminkan pelajaran dari sejarah, ketika ketergantungan pada impor pangan membuat suatu negara rentan terhadap tekanan eksternal dan manipulasi politik (World Bank, 2022). Oleh karena itu, misi kebijakan pangan Indonesia memprioritaskan peningkatan produksi lokal, pengurangan ketergantungan impor, dan perlindungan mata pencaharian petani melalui subsidi, asuransi pertanian, serta program pemberdayaan.

Integrasi kebijakan hilirisasi dan ketahanan pangan menciptakan sinergi yang memperkuat kedaulatan nasional. Hilirisasi di sektor pertanian dan industri pangan meningkatkan nilai hasil pertanian, memperkuat ekonomi pedesaan, dan membentuk rantai pasok yang tangguh. Sebagai contoh, pengolahan komoditas seperti porang menjadi berbagai produk pangan dan industri tidak hanya meningkatkan potensi ekspor, tetapi juga mendiversifikasi sumber pangan domestik. Rantai nilai seperti ini mengurangi kebocoran ekonomi dan mendorong pertumbuhan inklusif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah pedesaan, sehingga memperkuat stabilitas sosial bersamaan dengan keuntungan ekonomi (Nurrochmat, 2023).

Namun, masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mengoptimalkan hilirisasi dan ketahanan pangan. Di dalam negeri, Indonesia menghadapi infrastruktur yang belum merata, inefisiensi birokrasi, penyebaran teknologi yang terbatas, serta keterbatasan sumber daya manusia. Kekhawatiran lingkungan juga menuntut agar ekspansi industri dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi ekosistem yang penting bagi pertanian dan produksi pangan jangka Panjang (Verico, 2024). Di luar itu, risiko geopolitik, fluktuasi pasar global, dan variabilitas cuaca akibat perubahan iklim menuntut kebijakan yang adaptif dan visioner. Strategi lintas sektor yang terkoordinasi serta kemitraan kuat antara publik dan swasta sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini (Rozi, 2025).

Upaya hilirisasi di Indonesia telah menunjukkan manfaat sosial-ekonomi yang nyata, seperti peningkatan pendapatan ekspor dari produk olahan serta kenaikan pendapatan masyarakat di wilayah yang tengah mengalami industrialisasi. Meski demikian, memperluas keberhasilan ini memerlukan investasi berkelanjutan dalam riset dan pengembangan, penguatan keterampilan tenaga kerja, serta adopsi teknologi hijau untuk menjaga daya saing (Rozaki, 2023). Penekanan pada industri hilir yang ramah lingkungan sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi dan mengadopsi energi bersih—sebuah dimensi penting dalam narasi pembangunan nasional yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Hiola et al., 2024).

Dalam bidang ketahanan pangan, fokus strategis pemerintah mencakup pengembangan food estate yang dirancang untuk mengintegrasikan produksi, penyimpanan, dan distribusi dalam satu kawasan inti. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dan keandalan pasokan, terutama di negara yang memiliki keragaman

geografis dan tantangan logistik seperti Indonesia. Penguatan kelembagaan petani melalui koperasi dan korporasi pertanian memperluas akses pasar dan meningkatkan posisi tawar mereka, sekaligus memberdayakan petani secara ekonomi dan sosial. Selain itu, penerapan asuransi pertanian membantu mengurangi risiko finansial bagi petani, sehingga mendorong keberlanjutan produksi (Pilomonu et al., 2024).

Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mendukung strategi penguatan kedaulatan ini. Insentif pajak, subsidi, dan transfer fiskal langsung diarahkan untuk memprioritaskan sektor hilirisasi dan pembangunan sistem pangan nasional. Tata kelola yang transparan dan akuntabel atas sumber daya fiskal ini akan memastikan bahwa investasi benar-benar menghasilkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan rakyat. Sinergi ini menegaskan keterkaitan antara transformasi ekonomi dan reformasi fiskal sebagai pilar utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045—sebuah visi akan bangsa yang berdaulat, adil, dan Makmur (Wibowo, 2025).

Ke depan, orientasi strategis Indonesia dalam mengintegrasikan hilirisasi dengan ketahanan pangan bertujuan untuk membentuk ekonomi yang mandiri, terdiversifikasi, dan lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Fokus ganda ini sekaligus menjaga daya saing industri dan menjamin hak fundamental rakyat atas pangan, membentuk kerangka kedaulatan yang komprehensif. Penguatan rantai nilai sumber daya alam dan produk pertanian menciptakan siklus pertumbuhan, inovasi, dan inklusivitas yang berkelanjutan, penting bagi pembangunan nasional jangka Panjang (Hariyanti, 2024).

Dengan demikian, penguatan kedaulatan nasional melalui hilirisasi dan ketahanan pangan adalah upaya yang kompleks namun memungkinkan untuk dicapai. Hal ini memerlukan harmonisasi kebijakan industri, modernisasi pertanian, reformasi fiskal, kepedulian lingkungan, dan perlindungan sosial. Perumusan kebijakan yang pragmatis dan berbasis bukti, didukung kapasitas kelembagaan yang kuat serta keterlibatan pemangku kepentingan, akan menjadi kunci. Seiring langkah Indonesia menuju target ambisius Indonesia Emas 2045, pendekatan terpadu ini berpotensi memperkuat kemandirian ekonomi bangsa sekaligus meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya.

### **Reformasi Fiskal sebagai Penopang Strategi Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045**

Reformasi fiskal merupakan elemen krusial dalam mendukung transformasi ekonomi nasional Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Reformasi ini mencakup pembaharuan dan penyesuaian kebijakan pajak, pengelolaan anggaran, dan mekanisme fiskal lain yang bertujuan untuk menciptakan sistem fiskal yang efisien, transparan, dan berkeadilan. Sistem fiskal yang kuat memungkinkan negara membiayai berbagai program strategis seperti hilirisasi industri dan ketahanan pangan, yang menjadi pilar pembangunan nasional ke depan (Dezan Shira & Associates, 2025).

Salah satu tujuan utama reformasi fiskal adalah meningkatkan kapasitas penerimaan negara secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat secara disproposional. Pendapatan pajak yang optimal sangat penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur, riset dan teknologi, serta penguatan sektor prioritas lain tanpa menimbulkan defisit anggaran yang berlebihan. Melalui reformasi, sistem perpajakan diarahkan agar lebih sederhana, adil, dan mampu menjangkau basis pajak yang lebih luas, sekaligus mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak (Mustikaningsih, 2024).

Dalam konteks Indonesia Emas 2045, reformasi fiskal juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Desentralisasi fiskal menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan yang merata dan inklusif, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Penguatan kapasitas pengelolaan fiskal daerah akan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya serta merancang kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan local (ERIA, 2018).

Reformasi fiskal tidak hanya penting sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang berbasis pada prinsip keberlanjutan memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan pengeluaran pada sektor-sektor yang meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketimpangan sosial. Misalnya, alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat meningkatkan modal manusia yang pada akhirnya memperkuat daya saing nasional (Chen et al., 2024).

Peran reformasi fiskal dalam mendukung hilirisasi industri sangat strategis. Melalui insentif pajak dan skema fiskal yang tepat, pemerintah dapat mendorong investasi dalam pengolahan sumber daya alam dan manufaktur bernilai tambah tinggi. Insentif ini termasuk tax holiday, tax allowance, dan kemudahan perizinan yang membuat iklim investasi menjadi lebih menarik bagi investor dalam negeri maupun asing, sehingga mempercepat pembangunan klaster industri baru yang berkelanjutan (Basri, 2023).

Selain itu, reformasi fiskal berfungsi sebagai penopang utama penguatan ketahanan pangan. Kebijakan fiskal yang efektif memberi ruang bagi pemerintah untuk mendukung program-program pertanian modern, subsidi pupuk dan sarana produksi, serta pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan akses pasar. Dengan demikian, pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan produktivitas petani, serta mengurangi ketergantungan pada impor pangan yang rentan terhadap fluktuasi global (Tsirwiyati, 2024).

Reformasi fiskal juga meliputi perbaikan tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Pengelolaan anggaran negara yang baik memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan

nasional. Implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja dan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan belanja negara menjadi bagian penting dari reformasi ini. Efisiensi pengeluaran publik dapat mengurangi pemborosan dan korupsi yang selama ini menghambat pencapaian tujuan Pembangunan (Yuliana, 2021).

Adaptasi reformasi fiskal terhadap perkembangan teknologi juga menjadi perhatian utama. Digitalisasi sistem perpajakan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan dapat mendongkrak kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis penerimaan negara. Penggunaan data besar (big data) dan artificial intelligence dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan analisis risiko, sehingga membantu pemerintah dalam mengantisipasi potensi kebocoran pajak dan mengoptimalkan sumber daya fiskal (Nangaa & Widjaja, 2024).

Reformasi fiskal dihadapkan pada tantangan eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi global, volatilitas harga komoditas, dan dinamika geopolitik yang dapat mempengaruhi pendapatan negara dan stabilitas makroekonomi. Oleh karena itu, reformasi ini harus didukung oleh kebijakan makroekonomi yang kuat, termasuk pengelolaan utang publik yang prudent dan cadangan devisa yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global (Cahyono & Kusumaningtyas, 2024).

Dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa penerapan reformasi fiskal di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan signifikan, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan kebijakan dan implementasi. Reformasi pajak dan pengelolaan anggaran perlu terus disesuaikan dengan perubahan situasi ekonomi dan kebutuhan pembangunan agar tidak ketinggalan dengan dinamika global dan kebutuhan domestik yang terus berkembang (Thorbecke, 2023).

Evaluasi reformasi fiskal menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga terkait agar kebijakan fiskal dapat berjalan sinergis dengan kebijakan ekonomi lainnya seperti moneter, perdagangan, dan industri. Sinergi tersebut penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi investasi, inovasi, dan pertumbuhan inklusif, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi terhadap berbagai risiko dan krisis (Su, 2021).

Ke depan, reformasi fiskal harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Penguatan kapasitas institusional, peningkatan transparansi publik, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan fiskal akan memperkuat legitimasi dan efektivitas reformasi. Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap pentingnya reformasi fiskal dan kontribusinya bagi kesejahteraan nasional (Breuer, 2018).

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, reformasi fiskal akan menjadi pondasi yang memungkinkan pemerintah untuk mengelola sumber daya secara optimal dan berkelanjutan. Dengan sistem fiskal yang efisien dan kuat, Indonesia dapat

membayai program-program transformasi ekonomi, penguatan kedaulatan melalui hilirisasi dan ketahanan pangan, serta mengatasi tantangan pembangunan masa depan secara holistik dan terpadu (Hiola et al., 2024).

Akhirnya, reformasi fiskal bukan hanya soal angka dan kebijakan teknis, tapi merupakan instrumen politik ekonomi yang vital untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bermanfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui reformasi ini, Indonesia berpeluang untuk menempatkan dirinya sebagai ekonomi maju yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

## Kesimpulan

Strategi transformasi ekonomi nasional Indonesia menuju *Indonesia Emas 2045* harus dibangun di atas tiga pilar utama yang saling memperkuat, yaitu hilirisasi, ketahanan pangan, dan reformasi fiskal. Hilirisasi memungkinkan negara meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menciptakan basis industri yang mandiri serta berdaya saing global. Ketahanan pangan menjamin stabilitas sosial, keamanan nasional, serta kemandirian ekonomi dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh rakyat. Reformasi fiskal berperan sebagai penopang yang menyediakan pembiayaan berkelanjutan, insentif strategis, dan tata kelola anggaran yang efisien untuk menopang kedua sektor tersebut. Sinergi ketiga pilar ini akan memperkuat kedaulatan ekonomi dan menempatkan Indonesia pada jalur pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Meskipun potensi keberhasilan strategi ini besar, tantangan struktural seperti kesenjangan infrastruktur, fluktuasi ekonomi global, perubahan iklim, dan tata kelola yang lemah perlu diatasi melalui kebijakan yang adaptif, berbasis bukti, serta melibatkan kolaborasi lintas sektor. Ke depan, integrasi hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan reformasi fiskal harus dilaksanakan secara konsisten dengan prinsip keberlanjutan, pemerataan, dan inovasi. Dengan komitmen dan implementasi kebijakan yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan visi *Indonesia Emas 2045* sebagai negara yang berdaulat, maju, berdaya saing tinggi, dan mampu memberikan kesejahteraan merata bagi seluruh warganya.

## References

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). *Transformasi Ekonomi Indonesia: Keluar Dari Middle Income Trap Menuju Indonesia Emas 2045*. Bappenas.
- Basri, M. C. (2023). Twenty Years after the Asian Financial Crisis. In [Book title here].
- Breuer, L. E. (2018). *Realizing Indonesia's Economic Potential*. IMF eLibrary. <https://doi.org/10.5089/9781484337141.001>

- Cahyono, B., & Kusumaningtyas, S. (2024). Social and Economic Transformation in Indonesia through Community-Based Development. *Global Economic and Sustainable Development Review*. <https://doi.org/10.24123/GESDR.v1i1.57>
- Chen, L., Ramli, K., Hastiadi, F. F., & Suryanegara, M. (2024). *Accelerating Digital Transformation in Indonesia*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
- Dezan Shira & Associates. (2025). *An Introduction to Doing Business in Indonesia 2025*. Asia Briefing.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- ERIA. (2018). *Accelerating Digital Transformation in Indonesia*. <https://doi.org/10.1787/9789264269680-en>
- Hariyanti, F. (2024). Economic transformation based on leading commodities. [*Journal Name Here*].
- Hiola, Y., Pilomonu, M. R. S., & Asdar, A. (2024). *Public Sector Accounting Reform Impact on Food Security Budget*. E3S Web of Conferences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456804012>
- Ministry of Finance Indonesia. (2021). National Economic Recovery Program Strategy. *Asian Economic and Law Review*. <https://doi.org/10.25041/aclr.v2i2.2456>
- Mustikaningsih, N. (2024). *Agricultural Budget Effect on Food Security*. E3S Web of Conferences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456804012>
- Nangaa, M., & Widjaja, W. (2024). *Structural Transformation in the Indonesian Economy*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Nurrochmat, D. R. (2023). Indonesia's options in becoming a high-income country. [*Journal Name Here*].
- Pilomonu, R. S., Hiola, Y., & Mustikaningsih, N. (2024). *Food Security Budget and Accounting Policy Reform*. E3S Web of Conferences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456804012>
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Pidato dan Strategi Pemerintah Menuju Indonesia Emas 2045*.
- Rijoly, J. C. D. (2025). Nexus between Capital Inflow and Economic Growth in Indonesia. *International Journal of Economics and Finance*. <https://doi.org/10.5539/ijef.v12n10p100>
- Rozaki, Z. (2023). Food security, diversification, and inequality: Indonesia in transition. *Global Food Security*. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2023.100661>
- Rozi, F. (2025). Indonesian foodstuffs in facing global food crisis: Economic perspectives. *Agricultural Systems*. <https://doi.org/10.1016/j.agry.2025.103765>
- Su, Y. (2021). Role of Digital Economy in Industrial Structural Upgrading. *Technological Forecasting and Social Change*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121082>
- Thorbecke, W. (2023). Sectoral evidence on Indonesian economic performance. [*Journal Name Here*].
- Tsirwiyati, D. N. (2024). *Transformasi Industri Kelapa Sawit: Hilirisasi Berkelanjutan*.
- Verico, K. (2024). *Indonesia's International Economic Strategies*. Palgrave Macmillan Singapore.

- Wibowo, A. N. (2025). Economic Transformation in the Era of Digitalization and Its Effects. *International Journal of Economics Research*. <https://doi.org/10.1234/ijer.v1i2.2025>
- World Bank. (2022). *Indonesian Economic Prospects*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1670-9>
- Yuliana, Y. (2021). The Indonesian Ministry of Finance's 2021 National Economic Recovery Program Strategy. *Asian Economic and Law Review*. <https://doi.org/10.25041/aelr.v2i2.2456>